

**Peraturan Perundang Undangan yang Bersifat Teknis sebagai Acuan Pelaksanaan Kegiatan
Pada Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung (Penilaian Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian)**

Bidang :

No	Kementrian / Instansi	Nomor	Perihal	Keterangan
1	Undang - Undang	12 Tahun 1992	Sistem Budidaya Tanaman	Harmonis
2	Undang Undang	2 tahun 2015	Pemerintahan daerah	Harmonis
3	Peraturan Pemerintah	82 tahun 2000	Karantina Hewan	Harmonis
4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	1 Tahun 2011	Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Harmonis
5	Peraturan Pemerintah	6 tahun 2013	Pemberdayaan Peternak	Harmonis
6	Peraturan Menteri Pertanian	64/Permentan/OT.140/5/2013	Sistem Pertanian Organik	Harmonis
7	Peraturan Menteri Pertanian RI	67/PERMENTAN/SM.050/12/2016	Pembinaan Kelembagaan Petani	Harmonis
8	Peraturan Menteri Pertanian	14/PERMENTAN/PK.350/5/2017	Klasifikasi Obat Hewan	Harmonis
9	Peraturan Menteri Pertanian	03/Permentan/SM.200/1/2018	Pedoman Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian	Harmonis
10	Peraturan Menteri Pertanian	3 Tahun 2019	Pelayanan Jasa Medik Vetiriner	Harmonis
11	Peraturan Presiden	16 Tahun 2018	Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan	Harmonis
12	Instruksi Presiden Republik Indonesia	5 tahun 2015	Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah	Harmonis
13	Peraturan Bupati Klungkung	12 Tahun 2017	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Harmonis
14	Peraturan Menteri Pertanian	05 Tahun 2019	Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian	Harmonis
15	Peraturan Menteri Pertanian	Permentan No.03/2019 Pelayanan Jasa Medik Veteriner		Harmonis
16	Instruksi Presiden Republik Indonesia	05 Tahun 2015	Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan	Harmonis

			Penyaluran Beras Oleh Pemerintah	
17	Peraturan Menteri Pertanian	64/Permentan/OT.140/5/2013	Sistem Pertanian Organik	Harmonis
18	Peraturan Komisi Informasi	1 Tahun 2010	Standar Layanan Informasi Publik	Harmonis
19	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	38 Tahun 2018	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Harmonis
20	Peraturan Menteri Dalam Negeri	13 Tahun 2006	Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	Harmonis
21	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	41 Tahun 2018	Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Instansi Pemerintah	Harmonis
22	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	PER/220/M.PAN/7/2008	Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya	Harmonis
23	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia	07/Permentan/OT.140/2/2012	Pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Harmonis
24	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia	14/Permentan/PK.350/5/2017	Klasifikasi Obat Hewan	Harmonis
25	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia	21/Permentan/PP.200/4/2015	Pedoman Harga Pembelian Gabah Dan Beras Di Luar Kualitas Oleh Pemerintah	Harmonis
26	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia	67/Permentan/SM.050/12/2016	Pembinaan Kelembagaan Petani	Harmonis
27	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	1 Tahun 2011	Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Harmonis
28	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	6 Tahun 2013	Pemberdayaan Peternak	Harmonis
29	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	12 Tahun 2019	Pengelolaan Keuangan Daerah	Harmonis
30	Presiden Republik	82 Tahun 2000	Karantina Hewan	Harmonis

	Indonesia			
31	Presiden Republik Indonesia	2 Tahun 2015	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang	Harmonis
32	Presiden Republik Indonesia	14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik	Harmonis
33	Undang-Undang Republik Indonesia	12 Tahun 1992	Sistem Budidaya Tanaman	Harmonis
34	Bupati Klungkung Provinsi Bali	162/15/HK/2020	Pembentukan Tim Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan Kabupaten Klungkung Tahun 2020	Harmonis
35	Perda Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	Nomor 8 Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan	Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Bab II pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung no, 8 Tahun 2013 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Struktur tarif Retribusi yang telah dilakukan pungutan selama ini tidak sesuai dengan Fasilitas yang disediakan Pemkab Klungkung (hanya Fasilitas Pemotongan Ternak Sapi)	Tidak Harmonis